

**Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman  
Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Makassar**



**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syariah Dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

**Oleh:**

**ALI IMRAN**

**10400116118**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Imran

NIM : 10400116118

Tempat /Tgl. Lahir: Lona, 24 Desember 1998

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Alamat : BTN.Minasa Upa Blok E NO 4

Judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Makassar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa 20 Oktober 2021



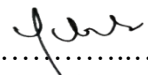



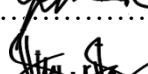
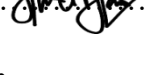
**ALIIMRAN**  
**NIM:10400116118**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KOTA MAKASSAR, yang disusun oleh Ali Imran, NIM: 10400116118, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum, Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 10 Juni 2021 M  
29 Syawal 1442 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M. Ag. (.....)	
Sekretaris	: Dr. Marilang, S.H., M.Hum. (.....)	
Munaqisy I	: Istiqamah, S.H.,M.H. (.....)	
Munaqisy II	: Ashabul Kahfi, S.Ag.,M.H. (.....)	
Pembimbing I	: Erlina, S.H.,M.H. (.....)	
Pembimbing II:	St.Nurjannah,S.H.,M.H.. (.....)	

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar



Muammar Muhammad Bakry, Lc., M. Ag

NIP: 19731122 20012 1 002

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan petunjuk-Nya yang dicurahkan kepada kita semua sehingga penulis dapat diberikan kemudahan, semangat dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Makassar”**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk meraih kesarjanaan di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. salam serta shalawat yang senantiasa kita curahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw, yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama yang sempurna dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidaklah mungkin selesai tanpa bimbingan, bantuan, saran dan kebersamaan orang-orang di sekitar penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya Bapak Ir.Muh.Alwi, M.MP dan Ibu Migawati, S.Pd. Karena dengan dukungan beliau sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikannya lebih tinggi.

2. Bapak Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag selaku Dekan pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar
3. Ibu Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
4. Bapak Dr. Marilang, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar
5. Bapak Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag, selaku Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
6. Kepada Ibu Erlina, SH., M.H, selaku Pembimbing I dan juga Ibu Siti Nurjannah, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan dan perhatiannya dengan penuh kesabaran serta ketulusan yang diberikan kepada penulis.
7. Kepada Ibu Istiqamah, SH., MH, selaku Penguji I dan juga Bapak Ashabul Kahfih, S.H.,M.H selaku Penguji II, atas arahan dan ilmu yang diberikan kepada penulis
8. Keluarga besar penulis, kakek, nenek, om dan tenta serta sepupu-sepupu terima kasih banyak atas dukungannya.
9. Keluarga Besar Forum Komunikasi Mahasiswa Dan Alumni As'adiyah (FKMA AS'ADIYAH) yang telah memberikan motivasi dan dukungannya.
10. Keluarga Besar ILMU HUKUM D 2016 atas dukungannya

Penyusun menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini.

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ali Imran', enclosed within a thin black rectangular border.

**ALI IMRAN**

**NIM:10400116118**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I        PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-12</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1-6
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	7-8
D. Kajian Pustaka.....	9-11
E. Tujuan Dan Kegunaan.....	12
<b>BAB II        TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>13-36</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen	13-14
1. Konsumen .....	15-18
2. Produsen Atau Pelaku Usaha .....	19

B. Tinjauan Umum Mengenai Label Halal.....	20
1. Brand Label.....	20
2. Descriptive Label .....	20
3. Grade Label.....	21-24
C. Tinjauan Umum Mengenai Makanan Dan Minuman ..	25-27
1. Pengertian Makanan.....	27-29
2. Pengertian Minuman .....	30-36
<b>BAB III      METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37-40</b>
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian .....	37
B. Pendekatan Penelitian .....	37
C. Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Instrumen Penelitian.....	40
F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data .....	40
G. Pengujian Keabsahan Data.....	40
<b>BAB IV      PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>41-51</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41-43
B. Ketentuan Hukum Bagi Produk Makanan Dan Minuman Yang Tidak Berlabel Halal Di Sulawesi Selatan .....	44-48



C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap konsumen Atas Produk Makanan Dan Minuman Ynag Tidak Berlabel Halal	49-51
--	-------

**BAB V        PENUTUP .....52-53**

A. Kesimpulan .....	52
---------------------	----

B. Impilasi.....	53
------------------	----

**DAFTAR PUSTAKA.....54-56**

**LAMPIRAN.....57-59**

**RIWAYAT HIDUP.....60**

## **ABSTRAK**

**Nama : Ali Imran**

**Nim : 10400116118**

**Fak/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum**

**Judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Yang Tidak Berlabel Halal Di kota Makassar.**

---

Penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan dan minuman tanpa label halal di kota Makassar, dengan sub masalahnya yaitu, 1) Bagaimana ketentuan hukum bagi produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar ? dan 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar?

Jenis penelitian ini tergolong penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosiologis, yuridis dan komparatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan skunder, selanjutnya pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar tepatnya di Lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika majelis ulama Indonesia Sulawesi Selatan (LPPOM MUI Sul-Sel).

Adapun hasil dari penelitian yaitu: 1) ketentuan hukum bagi produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar yaitu sesuai yang telah ditetapkan undang-undang perlindungan konsumen, jaminan produk halal. 2) bentuk perlindungan hukum atas peredaran makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar yaitu dengan cara penerbitan sertifikat halal, dan membuat undang-undang tentang jaminan produk halal.

Implikasi dari penelitian ini dapat dijadikan referensi atau masukan bagi pemerintah dan masyarakat yang terkait dengan masalah penegakan hukum terhadap peredaran makanan dan minuman tanpa label halal dan diharap peraturan berjalan sesuai yang diharapkan.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Makanan dan minuman adalah kebutuhan utama untuk keberlangsungan kehidupan, baik berupa bahan mentah, maupun siap saji (*instant*), telah beredar luas dipasaran. Beredarnya produk makanan ini memerlukan kontrol yang kuat dari pemerintah maupun pihak yang terkait (*stakeholder*) untuk memastikan bahwa produk makanan yang beredar di pasaran memenuhi standart dan layak untuk dikonsumsi. Pengendalian ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi.

Secara mendasar, konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu aktual dan selalu penting untuk dikaji.<sup>1</sup>

Perlindungan ini menjadi dorongan bagi para produsen untuk mendistribusikan makanan, dan minuman yang sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, perlindungan makanan menjadi standar yang sangat perlu di penuhi tingkat keamanannya. Hal ini karena produk makanan yang didistribusikan akan diserap langsung oleh pasar yang mayoritas konsumennya beragama Islam yang

---

<sup>1</sup>Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: GhaliaIndonesia, 2007), h. 17.

diwajibkan untuk mengonsumsi tertentu. Misalkan umat Islam yang diwajibkan mengonsumsi produk makanan yang halal atau umat Hindu yang tidak dibolehkan memakan olahan dari daging sapi. Oleh sebab itu, informasi tentang kandungan produk makanan serta informasi kehalalan produk menjadi standar makanan yang halal sebelum didistribusikan ke kalangan masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam pendistribusian produk-produk tersebut produsen terlebih dahulu wajib memenuhi hak-hak konsumen agar supaya setiap produk yang di edarkan tidak memiliki dampak negative terhadap konsumen. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 telah menetapkan ada 9 (sembilan) hak konsumen yaitu ssebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;

---

<sup>2</sup> UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 41

<sup>3</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 33.

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Dari hak konsumen yang diberikan di atas, hal yang paling mendasar ialah masalah keamanan, keselamatan dan kenyamanan konsumen merupakan hal yang paling utama dalam masalah perlindungan konsumen.

Mengingat kebutuhan konsumen yang sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi sehingga menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan pendistribusian produk barang atau jasa dengan cara yang tidak efektif.<sup>4</sup>

Dalam kasus-kasus perlindungan konsumen ada beberapa hal yang perlu dicermati, yakni:

1. Perbuatan pelaku usaha baik sengaja maupun karena kelalaiannya dan mengabaikan etika bisnis, ternyata berdampak serius dan meluas. Akibatnya kerugian yang diderita konsumen misal (*massive effect*) karena menimpa apa saja dan siapa saja;

---

<sup>4</sup> Erman Raja Guguk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Mandar Maju, 2003), h.2.

2. Dampak yang ditimbulkan juga bisa bersifat seketika (*rapidy effect*), sebagai contoh konsumen yang dirugikan (dari mengkonsumsi produk) bisa pingsan, sakit atau bahkan meninggal dunia. Ada juga yang ditimbulkan baru terasa beberapa waktu kemudian (*hidden defect*), contoh yang paling nyata dari dampak ini adalah maraknya predaran makanan dan minuman yang tidak berlabel/bersertifikat halal dalam berbagai jumlah produk yang bisa mengakibatkan masalah-masalah kesehatan di kemudian hari;
3. Banyaknya kalangan yang menjadi korban dari hal tersebut ialah masyarakat golongan bawah. Karena mereka tidak mempunyai pilihan yang lain, masyarakat ini terpaksa mengkonsumsi makanan dan minuman yang hanya semampunya, yang standar keamanannya sangat minim. Maka kondisi seperti inilah yang menyebabkan mereka selalu dekat dengan bahaya-bahaya yang bisa mengancam kesehatan dirinya kapan saja.<sup>5</sup>

Jika dilihat, kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen hanya menjadi objek yang tidak mempunyai kekuatan mandiri untuk menimbang suatu barang atau jasa. Ketika mendapati masalah, biasanya konsumen hanya diam. Sementara itu, pelaku usaha lebih tahu persis keadaan, kondisi dan kualitas barang yang dihasilkan.

---

<sup>5</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk* (Bogor: Panta Reir, 2005), h. 11.

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat sering dan mudah untuk dilanggar. Terhadap posisi konsumen tersebut, harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.<sup>6</sup>

Mengingat bahwasanya Indonesia adalah negara dengan penduduk agama islam terbesar di dunia, serta menjunjung tinggi Syariat islam. Maka oleh sebab itu pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi penduduknya yang beragama Islam. Maka pada tahun 2014 lahirlah suatu aturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan Hukum bagi penduduknya yang beragama Islam , yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, di dalam Undang-Undang tersebut pemerintah dengan tegas melarang peredaran suatu produk yang tidak memiliki sertifikat halal (berlabel hala) yaitu tertera pada pasal 4 yang berbunyi “produk yang masuk beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal adalah sebagai landasan Hukum yang bertujuan memberikan perlindungan Hukum

---

<sup>6</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 1

<sup>7</sup> UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pasal 4.



terhadap konsumen muslim terhadap ketidakpastian berbagai produk, terutama makanan, dan minuman yang tidak memiliki label halal.

Tujuan pemberian label pada barang dan jasa adalah agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi produk tersebut dapat memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk makanan dan minuman yang di kemas, baik menyangkut asal, kemasan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi barang tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi produk yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan (*prepackaged*), tetapi tidak berlaku bagi perdagangan makanan dan minuman yang di bungkus di hadapan pembeli. Penggunaan label dalam kemasan selalu berkaitan dengan aspek perdagangan.<sup>8</sup>

Walaupun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal. Karena karena Undang-Undang ini belum efektif, contohnya masih banyak produk-produk makanan dan minuman yang telah diedarkan kalangan masyarakat tidak memiliki label halal.

---

<sup>8</sup> Tini Hadad, Dalam AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Diadit Media, 2001), h. 45.

## ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas antara lain:

- a. Bagaimana ketentuan hukum terhadap pencantuman label halal terhadap produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal.
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal.

## ***C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus***

Agar permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini tidak luas dan tidak menyimpang dari rumusan masalah yang ditemukan, maka peneliti perlu dibatasi permasalahannya sesuai judul dengan skripsi ini maka penulis membatasi tentang perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Makassar sebagai berikut:

### **1. Fokus Penelitian**

- a. Perlindungan hukum
- b. Konsumen
- c. Label halal

### **2. Deskripsi Fokus**

- a. Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan perlindungan adalah tempat berlindung hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.<sup>9</sup>

Sedangkan perlindungan dalam arti hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>10</sup>

#### b. Konsumen

Dalam kamus besar Bahasa Indoneia (KBBI) yang dimaksud dengan Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, minuman dan sebagainya).<sup>11</sup> Sedangkan konsumen menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 1 ayat (2) "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak unntuk di perdagangkan.

#### c. Label Halal

---

<sup>9</sup> <https://kbbi-web-id.cdn.amproject.org/v/s/kbbi.web.id/perlindungan>. Di akses pada tanggal 30 september 2020,pukul 14:40.

<sup>10</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II>. perlindungan Di akses pada tanggal 30 september 2020 pukul 16:12.

<sup>11</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/konsumen.html> di akses pada tanggal 30 september 2020 pukul 15:51

Label halal menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 1 ayat 11 menyatakan “label halal adalah tanda kehalalan suatu produk”.<sup>12</sup>

#### ***D. Kajian Pustaka***

Agar pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi dengan beberapa sumber buku yang di dalamnya terdapat pandangan dari sebagian ahli yang berkaitan dengan pembahasan rencana penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Zulham, dalam bukunya Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal. Dalam buku ini dibahas tentang konsep halal dan haram dalam hukum Islam, peran negara dalam perlindungan muslim, perbandingan sertifikasi dan labelisasi halal atas credential products sebagai perlindungan konsumen muslim, serta analisis pemikiran perspektif al-maslaha (public interest) terhadap pengelolaan sertifikasi dan labelisasi halal sebagai perlindungan konsumen muslim di Indonesia.
2. Ahmadi Miru Dan Sutarmaan Yodo, dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen. Dalam buku ini membahas tentang hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia diantaranya asas dan tujuan, hak dan kewajiban, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, ketentuan pencantuman klausula baku, tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan, badan perlindungan konsumen nasional, lembaga perlindungan

---

<sup>12</sup> UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pasal 1 ayat 11

konsumen suadaya masyarakat, penyelesaian sengketa, badan penyelesaian sengketa konsumen, pendidikan, sanksi, serta ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

3. Rosmawati, dalam bukunya pokok-pokok hukum perlindungan konsumen dalam buku ini membahas tentang pengertian konsumen dan perlindungan konsumen, sejarah hukum perlindungan konsumen, ruang lingkup dan asas perlindungan konsumen, kedudukan konsumen, dalam beracara, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, transaksi konsumen dalam periklanan, klausula baku, sanksi dalam pelanggaran perlindungan konsumen, gerakan perlindungan konsumen, lembaga penyelesaian konsumen, serta metode penyelesaian sengketa berdasarkan UUPK dan contoh kasus.
4. Ahmadi Miru, dalam bukunya prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia dalam buku ini membahas tentang tinjauan umum hukum perlindungan konsumen, di Indonesia, serta refleksi prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
5. Celina Ti Siwi Kristiyanti, dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen dalam buku ini membahas tentang latar belakang hukum perlindungan konsumen, pengertian hak dan kewajiban konsumen, serta pelaku usaha, perlindungan konsumen dalam peraturan perundang-undangan, berbagai aspek hukum perlindungan konsumen, prinsip-prinsip hukum perlindungan

konsumen, lembaga/instansi dan perannya dalam perlindungan konsumen, isu-isu hukum perlindungan konsumen, serta penyelesaian sengketa konsumen.

Dari beberapa literatur-literatur yang sudah dijelaskan, tidak ditemukan yang membahas secara rinci tentang persoalan yang diuraikan dalam skripsi. Walaupun ada diantaranya yang membahas tentang hukum perlindungan konsumen, namun bersifat umum, maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang hukum perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman yang tidak berlabel halal.

#### ***E. Tujuan Penelitian***

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukum bagi produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal.

#### ***F. Kegunaan Penelitian***

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan dan minuman yang tidak berlabel halal.

- b. Kegunaan Praktis

Untuk dapat digunakan sebagai acuan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Serta dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### ***A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen***

Pelindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha.<sup>13</sup> Kondisi konsumen di Indonesia masih sering mengalami hal-hal yang merugikan dirinya, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah<sup>14</sup>

Dalam undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 angka 1 “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Rumusan pengertian perlindungan konsumen pada pasal 1 angka 1, kalimat yang menyatakan” segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk perlindungan konsumen.<sup>15</sup>

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan

---

<sup>13</sup> Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Cet.I:Depok:kencana 2018), h.1.

<sup>14</sup> Ashabul Kahpi .” *Perlindungan Terhadap Konsumen dari Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia/Zat Berbahaya Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999* “(Jurnal , Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

<sup>15</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Cet.X: Jakarta: Rajawali Pers 2017), h.1.



perlindungann hukum antara konsumen dan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal tersebut, tentu saja akan merugikan konsumen.

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.<sup>16</sup>

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efesiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Cet.III:Depok:Rajawali Pers 2017), h.1.

<sup>17</sup> Celina Tri Siwi Kristiyant, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Cet.VII:Jakarta:Sinar Grafika 2018), h.5

Berkaitan dengan perlindungan konsumen, mempergunakan berbagai istilah yang dapat diberi makna berbeda-beda, yang akhirnya dapat pula membawa akibat hukum yang berbeda. Untuk itu perlu dikemukakan berbagai istilah yang lazim dipergunakan dalam dalam perlindungan konsumen tersebut.<sup>18</sup>

#### **a. Konsumen**

Sebagai suatu konsep, “konsumen telah diperkenalkan beberapa puluh tahun lalu di berbagai negara dan sampai saat ini sudah puluhan negara memiliki undang-undang atau peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk penyediaan sarana peradilanannya. Sejalan dengan perkembangannya itu, berbagai Negara telah pula menetapkan hak-hak konsumen yang digunakan sebagai landasan pengaturan kepada konsumen. di samping itu, telah pula berdiri organisasi konsumen internasional, yaitu internasional *organization of consumer union* (UICO). Di Indonesia telah pula berdiri berbagai organisasi konsumen seperti Yayasan Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta, dan organisasi konsumn lain di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan sebagainya.<sup>19</sup>

Istilah konsumen bersal dari ahli Bahasa *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengerian dari *Consumer* atau *consument*

---

<sup>18</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Cet.III:Depok:Rajawali Pers 2017),h.19

<sup>19</sup> Nurmadjito, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 12

itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secarah harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsent) setiap orang yang menggunakan barang.<sup>20</sup>

Adapun kesulitannya untuk merumuskan definisi konsumen, namun para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa arti konsumen adalah pemakai terakhir dari benda/atau jasa (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diesten*) yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha (*ondernemer*).<sup>21</sup>

Pada pasal 1 angka 2 undang undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen berbunyi “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup yang lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Penggunaan istilah “pemakai” dalam rumusan pasal 1 angka 2 tersebut sesungguhnya kurang tepat. Ketentuan yang menyatakan “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat”, apabila dihubungkan dengan anak kalimat yang menyatakan “bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup yang lain”, tampak ada kerancuan di dalamnya. Sebagai pemakai dengan sendirinya untuk kepentingan diri sendiri, dan bukan untuk keluarga, bijstander, atau mkhluk hidup lainnya demekian pula penggunaan istilah yang lainnya “pemakai” menimbulkan kesan

---

<sup>20</sup> Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Cet.VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.22.

<sup>21</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2006), h. 2.

barang tersebut bukan milik sendiri, walaupun sebelumnya telah terjadi transaksi jual beli. Jika seandainya istilah yang digunakan “setiap orang yang memperoleh” maka secara hukum akan memberikan makna yang lebih tepat, karena apa yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk orang lain.<sup>22</sup>

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan,
- b. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- c. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan untuk mencari keuntungan kembali

Pengertian konsumen menurut Philip Kotler adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi

---

<sup>22</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Cet.X: Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.4-5.

<sup>23</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), h. 13.

pribadi. Pendapat lain merumuskan, bahwa konsumen adalah setiap individu atau kelompok yang menjadi pembeli atau pemakai akhir dari kepemilikan khusus, produk, atau pelayanan dan kegiatan, tanpa memperhatikan apabila ia berasal dari pedagang, pemasok, produsen pribadi atau publik, atau apakah ia berbuat sendiri ataukah secara kolektif.<sup>24</sup>

Di Indonesia telah banyak diselenggarakan studi, baik yang bersifat akademis, maupun untuk tujuan mempersiapkan dasar-dasar penerbitan suatu aturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen. Dalam naskah-naskah akademik dan/atau berbagai naskah pembahasan rancangan peraturan perundang-unang-undangan, cukup banyak dibahas dan dibicarakan tentang berbagai peristilahan yang termasuk dalam lingkup perlindungan konsumen.

Dari naskah-naskah akademik itu yang patut dapat perhatian, antara lain:<sup>25</sup>

1. Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman (BPHN), menyusun batasan tentang konsumen akhir, yaitu pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri, atu orang lain, dan tidak untuk diperjualbelikan.

---

<sup>24</sup> Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Cet.I:Depok:kencana 2018), h.4.

<sup>25</sup> Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Cet.VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.23.

2. Batasan konsumen dari yayasan lembaga konsumen Indonesia, pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain tidak untuk diperdagangkan kembali.
3. Sedangkan dalam naskah akademis yang dipersiapkan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI) bekerja sama dengan departemen perdagangan RI, berbunyi: konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.

#### **b. Produsen Atau Pelaku Usaha**

Dalam penjelasan pasal 1 angka 3 undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu: pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Penjelasan pada pasal 1 angka 3 yaitu pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut adalah perusahaan, korporasi, BUMN, Koperasi, Importir, Pedagang, Distributor, dan lain-lain.<sup>26</sup>

Berdasarkan *directife*, pengertian produsen meliputi:<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Cet.X:Jakarta:Rajawali Pers 2017), h.8.

<sup>27</sup> Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Cet.VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.41-42.

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan kemasyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.
3. Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

#### ***B. Tinjauan Umum Mengenani Label Halal***

Menurut Stanton dan William label adalah bagian sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau tentang penjualnya. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan atau pula etiket (tanda pengenal) yang dicantumkan pada produk. Stanton dan J william membagi label kedalam tiga klasifikasi yaitu:<sup>28</sup>

1. *Brand* Label, yaitu merek yang diberikan pada produk atau dicantumkan pada kemasan.
2. *Descriptive* Label, yaitu label yang memberikan informasi objektif mengenai penggunaan, konstruksi/pembuatan, perhatian/perawatan, dan

---

<sup>28</sup> Yuli Mutiah Rambe, Syaad Afifuddin, “Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Al-Washliyah, Medan)” , Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1, (Desember 2012), Diakses 7 Oktober 2020).

kinerja produk, serta karakteristik-karakteristik lainnya yang berhubungan dengan produk.

3. *Grade Label*, yaitu label yang mengidentifikasikan penilaian kualitas produk (*product's judged quality*) dengan suatu huruf, angka, atau kata.

Misalnya, buah-buahan dalam kaleng diberi label kualitas A,B dan C.

Kotler menyatakan bahwa label memiliki 3 fungsi utama yaitu:<sup>29</sup>

1. Mengidentifikasi produk atau merek
2. Menentukan kelas produk
3. Menjelaskan produk yaitu siapa pembuatnya, kapan, dimana dan apa isinya.

Label merupakan alat penyampaian informasi tentang produk yang tercantum pada kemasan. Selain memberikan informasi mengenai nama produk, label juga memberikan informasi daftar bahan yang terkandung dalam produk, berat bersih, daya tahan, nilai ataupun kegunaan produk serta keterangan tentang halal.

Pencantuman tulisan “halal” diatur oleh keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/MENKES/SKB/VIII/1985.<sup>30</sup> Secara Bahasa, kata “Halal” berasal dari Bahasa arab yang sudah diserap menjadi

---

<sup>29</sup> Tengku Putri Lindung Bulan, ” Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Sosis di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang”, Jurnal Manajemen Dan Keuangan, Vol.5, No.1, (Mei 2016), (Diakses Tanggal 7 Oktober 2020).

<sup>30</sup> Yuli Mutiah Rambe, Syaad Afifuddin, “Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Al-Washliyah, Medan)” , Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1, (Desember 2012), Diakses 7 Oktober 2020).



Bahasa Indonesia. Halal berasal dari kata “halla” yang berarti diizinkan, dibolehkan atau tidak dilarang, dan lawan kata dari haram. Ahmad Al-Syarbasi menyebutkan, halal adalah segala sesuatu yang tidak dihukum bagi pelakunya atas perlakuannya, maka halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan syariat atas perbuatannya, Qardawi menyebutkan, halal adalah sesuatu yang mubah (diperkenankan), yang lepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh pembuat syariat (Syari’) untuk dilakukan.<sup>31</sup>

Halal berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan dan membolehkan. Dalam kaitan dengan hukum syara’, ia memiliki dua pengertian.<sup>32</sup>

Kehalalan adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap muslim, sesuatu yang halal bisa menjadi berkah untuk manusia. Kehalalan merupakan pokok utama bagi umat muslim untuk beribadah agar senantiasa manusia selalu di jalan yang benar, di samping itu kehalalan tertera dalam Al Quran dan Hadist. Islam mengajarkan kita agar senantiasa untuk mengkonsumsi segala kebutuhan di muka bumi dengan memilih yang serba halal dan baik, baik makanan dan minuman atau kebutuhan lain seperti obat-obatan, pakaian dan lain-lainnya, disebut halal apabila bahan-bahan yang terkandung dalam keduanya harus dari

---

<sup>31</sup> Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Cet.1: Jakarta timur: Kncana, 2018),h.69.

<sup>32</sup> Sucipto, “Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau’idhotul Mukminin”, (Diakses Tanggal 7 Oktober 2020).

bahan baku pilihan yang sesuai syariat islam dan memiliki sertifikat halal yang resmi di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>33</sup>

Label halal merupakan label yang memberikan informasi kepada konsumen tentang suatu produk yang telah memiliki label bahwa produknya benar-benar dan memiliki kandungan nutrisi baik sehingga produknya aman untuk dikonsumsi. Produk makanan yang tidak mempunyai label halal pada kemasannya dianggap masih belum memiliki persetujuan dari LPPOM-MUI sehingga produk tersebut masih diragukan kehalalannya dan akan membuat konsumen muslim ragu dalam melakukan keputusan pembelian pada produk tersebut.<sup>34</sup>

Label halal adalah pemberian tanda halal atau bukti tertulis sebagai jaminan produk yang halal dengan tulisan Halal dalam huruf Arab, huruf lain dan motor kode dari Menteri yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan halal dari lembaga pemeriksaan halal yang dibentuk oleh MUI, fatwa halal dari MUI, sertifikat halal dari MUI sebagai jaminan yang sah bahwa produk yang

---

<sup>33</sup>Shilachul Alfinul Alim, M Kholid Mawardi, Aniesa Samira Bafadhal, “Pengaruh Persepsi Label Halal Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fesyen Muslim ( Survei pada Pelanggan Produk Zoya Muslim di Kota Malang )”, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 62 No. 1 (September 2018), (Diakses 7 Oktober 2020).

<sup>34</sup> Vivi Yunitasari, Moch. Khoirul Anwar, “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan Impor Pada Mahasiswa Ekonomi Universitas Negeri Surabaya” Jurnal Ekonomi Islam Volume 2 Nomor 1, (Tahun 2019), (Diakses 7 Oktober 2020)

dimaksud adalah halal dikonsumsi serta digunakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>35</sup>

Pencantuman label halal pada tiap kemasan produk bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan pada produk tersebut dan untuk menentramkan batin konsumen muslim akan prosedur, bahan baku, dan pengolahan dari produk itu sendiri, sehingga masyarakat tak ragu dan memutuskan untuk melakukan pembelian. Ciptono menjelaskan bahwa label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Dari pengertian label tersebut, maka label halal sendiri dapat diartikan sebagai informasi mengenai suatu produk yang telah diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam.<sup>36</sup>

Kehalalan suatu produk makanan sangat begitu penting, oleh karena itu regulasi maupun lembaga yang mengatur tentang masalah tersebut harus dilaksanakan secara konsekuen, agar regulasi dan lembaga tersebut diharapkan mampu memberi kenyamanan kepada konsumen, khususnya yang beragama

---

<sup>35</sup> Ian Alfian, Muslim Marpaung, “Analisis Pengaruh Label Halal, Brand Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Di Kota Medan”, *At-Tawassuth*, Vol. 2, No. 1, (Tahun 2017), (Diakses 7 Oktober 2020).

<sup>36</sup> Shilachul Alfinul Alim, M Kholid Mawardi, Aniesa Samira Bafadhal, “Pengaruh Persepsi Label Halal Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fesyen Muslim ( Survei pada Pelanggan Produk Zoya Muslim di Kota Malang )”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*|Vol. 62 No. 1 (September 2018), (Diakses 7 Oktober 2020).

Islam, agar tidak ada keraguan mengenai kehalalan produk makanan yang dikonsumsi.<sup>37</sup>

Label halal menjadi salah satu kriteria yang sangat penting yang dapat digunakan untuk membedakan sehingga juga bertujuan untuk membantu konsumen terutama konsumen muslim untuk mengevaluasi produk dan meyakinkan mereka akan kualitas produk tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah penduduk muslim di Indonesia sangat besar. Banyaknya penduduk muslim di Indonesia tentu membawa pengaruh yang besar bagi budaya yang berkembang di Indonesia<sup>38</sup>

### ***C. Tinjauan Umum Mengenai Makanan Dan Minuman***

Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak hanya halal namun harus juga baik

QS.Al-Maidah (5):88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

---

<sup>37</sup> Vivi Yunitasari, Moch. Khoirul Anwar, "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan Impor Pada Mahasiswa Ekonomi Universitas Negeri Surabaya" Jurnal Ekonomi Islam Volume 2 Nomor 1, (Tahun 2019), (Diakses 7 Oktober 2020)

<sup>38</sup> Shilachul Alfinul Alim, M Kholid Mawardi, Aniesa Samira Bafadhal, "Pengaruh Persepsi Label Halal Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fesyen Muslim ( Survei pada Pelanggan Produk Zoya Muslim di Kota Malang )", Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 62 No. 1 (September 2018), (Diakses 7 Oktober 2020).

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.<sup>39</sup>

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada hambanya agar mereka makan rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan kepada mereka. Halal di sini mengandung pengertian halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan baik adalah dari segi kemanfaatannya, yaitu yang mengandung manfaat dan maslahat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein dan sebagainya. Makanan tidak baik selain tidak mengandung gizi, juga jika dikonsumsi akan merusak kesehatan.

Ayat ini memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. Maksud ayat tersebut tidak terbatas pengertiannya hanya pada makanan, tetapi juga produk-produk lainnya, seperti kosmetika, obat dan barang gunaan lainnya yang harus halal. Namun pada zaman sekarang, yang diikuti perkembangan teknologi proses pengolahan makanan minuman, kosmetika dan obat telah melibatkan proses yang kompleks dan mengandung aneka ragam bahan sehingga permasalahan makanan, minuman obat kosmetika dan barang gunaan halal menjadi tidak seimbang, penetapan kehalalan suatu produk halal tidaklah mudah.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> <https://tafsirweb.com/1972-quran-surat-al-maidah-ayat-88.html>. Diakses Pada Tanggal 7 Oktober 2020, Pukul 03.35

<sup>40</sup> Musyfikah Ilyas, “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat”, Al - Qadau (Volume 4 Nomor (2 Desember 2017), (Diakses Tanggal 7 Oktober 2020).

### **a. Makanan**

Makanan (pangan) merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia berdampingan dengan kebutuhan primer lainnya berupa sandang dan pangan.<sup>41</sup> makanan menurut bahasa adalah terjemahan dari kata *tha'am* bentuk tunggal dari *athi'mah*. Dalam bahasa Indonesia makanan berarti segala yang boleh dimakan seperti panganan, lauk pauk dan kue-kue. Menurut al Khalil, seperti dikutip oleh Ibnu Faris dan Ibnu Manzhur, penggunaan kata *tha'am* dalam percakapan orang Arab dikhususkan pada gandum, seperti sabda Nabi Saw dari Abi Saïd al Khudry tentang zakat fitrah: satu sha gandum. Menurut Ibnu Manzhur dan Ensiklopedia al-Qur'an, *tha'am* adalah kata yang digunakan untuk semua jenis yang dimakan.

Sebagian yang lain berpendapat semua yang diiri lalu tumbuh, sebab itu tumbuh tanaman air tersebut menurut Ibnu Katsir, semua yang termasuk dalam kategori biji-bijian seperti gandum dan kurma. Menurut al-Thabary, *tha'am* adalah apa yang dimakan dan diminum. Sedangkan pengertian makanan menurut istilah adalah apa saja yang dimakan oleh manusia dan disantap, baik berupa barang pangan, maupun yang lainnya.<sup>42</sup>

Adapun makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, kaya akan serat dan zat yang dibutuhkan untuk perkembangan tubuh. Dilihat dari kandungannya, makanan sehat adalah makanan yang mengandung karbohidrat,

---

<sup>41</sup> Kahfi, A. (2018). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(1), 47-63.

<sup>42</sup>Huzaemah TahidoYanggo, "Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukumislam", Vol.Ixno.2,(Desember2013), (Diakses Tanggal 7 Oktober 2020).

protein, mineral, vitamin, dan lemak tak jenuh. Makanan yang memenuhi kriteria seperti ini lebih dikenal dengan sebutan empat sehat lima sempurna. Tujuan utama mengonsumsi makanan sehat adalah agar tubuh tetap sehat, berkembang dengan baik serta terhindar dari segala penyakit. Oleh karena itu, kita harus selalu mengonsumsinya setiap hari.<sup>43</sup>

Al-Qur'an mengisyaratkan, bahwa dalam mengonsumsi tidak hanya halal saja, namun juga harus thayyib. Hal ini terbukti dengan kata-kata halalan dalam beberapa ayat Al-Qur'an selalu diikuti dengan kata-kata thayyiban. Karena tidak semua makanan yang halal akan menjadi thayyib bagi konsumennya. Misalnya penderita penyakit diabetes, dalam kondisi sakit dengan kadar gula yang tinggi dalam tubuhnya namun tetap saja dia mengonsumsi gula. Hal ini tentu saja membahayakan kesehatan konsumen gula tersebut, walaupun gula tersebut halal untuk dikonsumsi namun tidak baik/thayyib bagi konsumen tersebut.

Produk makanan halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, antara lain:

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.

---

<sup>43</sup>Ahmad Halka, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk Makanan dan Minuman di Kota Makassar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Skripsi* (Makassar :Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Makassar,2017)

4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara syariat Islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Maka, secara umum makanan dan minuman yang haram terdiri dari binatang tumbuh-tumbuhan sebagai berikut:

1. Binatang: bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh tertanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala, kecuali ikan dan belalang boleh dikonsumsi tanpa disembelih. Binatang yang dipandang jijik atau kotor menurut naluri manusia. Binatang dan burung buas yang bertaring dan memiliki cakar, binatang-binatang yang oieh ajaran Islam diperintahkan membunuhnya seperti ular, gagak, tikus, anjing galak dan burung elang dan sejenisnya, binatang-binatang yang dilarang membunuhnya seperti semut, lebah, burung hudhud, belatuk, hewan yang hidup di dua jenis alam seperti kodok, penyu, buaya.
2. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan boleh dimakan kecuali yang mendatangkan bahaya atau memabukkan baik secara langsung maupun



melalui proses. Maka semua jenis tumbuh-tumbuhan yang mengandung racun atau yang memabukkan haram dimakan.

3. Semua jenis minuman adalah halal kecuali minuman yang memabukkan seperti arak dan yang dicampur dengan benda-benda najis, baik sedikit maupun banyak.<sup>44</sup>

#### **b. Minuman**

Minuman adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi dan dapat menghilangkan rasa haus. Minuman umumnya berbentuk cair, namun ada pula yang berbentuk padat seperti es krim atau es lilin. Minuman kesehatan adalah segala sesuatu yang dikonsumsi yang dapat menghilangkan rasa haus dan dahaga juga mempunyai efek menguntungkan terhadap kesehatan.<sup>45</sup>

Minuman adalah segala sesuatu yang diminum masuk ke dalam tubuh seseorang yang juga merupakan salah satu intake makanan yang berfungsi untuk membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberi tenaga, mengatur semua proses di dalam tubuh. Manusia membutuhkan minum dalam kehidupan yang dijalannya setiap hari untuk bisa bertahan hidup dengan baik. Dari segi jumlah, air yang dikonsumsi pun juga harus dalam jumlah yang cukup banyak yaitu beberapa liter air setiap hari. Kekurangan air bisa menyebabkan manusia terkena berbagai gangguan kesehatan seperti dehidrasi, diare, batu ginjal, dan lain sebagainya.

---

<sup>44</sup> Dharu Triasih dkk, "Kajian tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal" Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18 Nomor 2, 2016.

<sup>45</sup> Sri Winarti, *Minuman Kesehatan* (Surabaya: Trubus Agrisarana, 2006), h. 12

Tubuh manusia yang sebagian besar terdiri atas unsur air menjadi bukti nyata bahwa manusia sangat membutuhkan air yang cukup untuk dikonsumsi setiap hari.<sup>46</sup>

Jenis minuman yang tersedia setiap hari bervariasi. Minuman dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:<sup>47</sup>

1. Air putih, ini merupakan minuman netral dengan syarat tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa;
2. Kopi dan teh, ini minuman yang dapat dikonsumsi selagi panas ataupun dingin;
3. Wedang jahe, wedang ronde yang dikonsumsi umumnya selagi panas;
4. Es sirup yang lazim dikonsumsi dingin. Es sirup ini dibuat dari gula pasir yang dilarutkan dalam air dengan perbandingan tertentu, lalu direbus sampai mendidih;
5. Jus buah juga sering diminum sebagai minuman dingin, yaitu minuman yang dibuat dari buah-buahan yang dihaluskan menggunakan satu macam buah atau campuran beberapa buah ditambah dengan sirup atau gula pasir dan es batu;
6. Es buah, yaitu es sirup yang diisi dengan beberapa macam buah yang dipotong-potong kecil dan ditambah es;

---

<sup>46</sup> Soejoeti Tarwotjo, *Dasar-Dasar Gizi Kuliner* (Jakarta :Grasindo,2008)

<sup>47</sup> Sri Winarti, *Minuman Kesehatan* (Surabaya: Trubus Agrisarana, 2006),hal.14

7. Es krim yang terbuat dari susu, gula, telur, dan bahan tambahan seperti buah- buahan;
8. Es puter, adalah mirip dengan es krim. Bedanya kalau es krim menggunakan susu;
9. Es teller yaitu es yang diisi dengan berbagai macam bahan, seperti nangka masak, kelapa muda, tape dan alpukat;
10. Minuman ringan (Soft drinks), yaitu minuman yang tidak mengandung alkohol, hanya mengandung gula, atau soda. Misalnya merek Cola-cola, Sprite, Fanta dan juga minuman berenergi yang salah satunya adalah Minuman Isotonik.

Kemajuan teknologi pangan pada saat ini harus di waspadai, karena banyak bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi suatu makanan olahan. Untuk menjamin agar produk pangan (makanan dan minuman) aman dari pengaruh teknologi maka harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>48</sup>

a. Prinsip-Prinsip Produk Makanan

1. Makanan Halal

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asri (2016) tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produksi pangan yang tidak bersertifikat halal, menunjukkan bahwa mayoritas konsumen tidak

---

<sup>48</sup> Asri, “*Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal* ”, Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), Volume IV Nomor 2, 2016.

selektif dalam memilih makanan. Ketidaktahuan atau mengikuti selera adalah faktor penyebab yang utama. Perkembangan teknologi pengolahan pangan tidak selalu menghasilkan makanan yang baik dan sehat. Diduga terdapat produk makanan yang mengandung unsur-unsur haram dalam bahan tambahan yang digunakan. Oleh karena itu tiga kriteria yakni : halal, thayyiba dan bergizi seharusnya terpenuhi dalam memilih makanan.

Kriteria halal pada makanan yang ditetapkan oleh para ahli Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) bersifat umum dan sangat berkaitan dengan persoalan teknis pemeriksaan. Memeriksa suatu makanan, senantiasa berdasar pada standar, mulai dari bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi dan jenis kemasan. Penelusuran bahan-bahan tersebut tidak hanya berasal dari babi atau bukan, tetapi juga meliputi cara penyembelian, cara penyimpanan dan metode produksi.

## 2. Makanan Haram

Pada dasarnya makanan haram sebagaimana dalam Al-Qur'an dan Hadist kadarnya tidak banyak, namun karena pengaruh bahan lainnya itulah menyebabkan kategori keharaman mengalami pengembangan seperti penggunaan gelatin (berasal dari lemak Babi). Penggunaan gelatin telah menyisir hampir setiap produk makanan, minuman dan obat-obatan. Penggunaan gelatin dalam industri pangan saat ini cukup luas, mulai dari emulasi, pasta, permen lunak, minuman, jelly hingga kapsul.

Bahan pembuatan makanan dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik berasal dari hewan maupun tumbuhan alami. Ini dilakukan untuk meningkatkan “mutu” makanan tersebut, baik dari segi rasa, tekstur, maupun warna. Selain bahan utama, bahan yang sering digunakan adalah bahan tambahan. Bahan ini berasal dari proses kimiawi bahan alami maupun proses kimiawi bahan sintetik. Hanya, sebagian gelatin merupakan produk turunan yang berasal dari hewan, termasuk babi. Karena selain memiliki kekenyalan yang khas, gelatin dari babi juga dianggap lebih murah dibandingkan dengan bahan lainnya. Belakangan ini gelatin dari siapapun mulai banyak dibuat, namun meskipun berasal dari sapi, kehalalannya masih harus dipantau.

**b. Prinsip-Prinsip Produk Minuman**

Kaidah yang berlaku untuk produk minuman pada dasarnya tidaklah bersifat khusus. Sebab, berkat kemajuan teknologi bahan-bahan yang digunakan dalam proses makanan juga dapat digunakan dalam produk minuman, seperti perasa (flavour), vitamin dan sebagainya. Oleh karena itu, kaidah hukum yang berlaku untuk produk makanan juga berlaku untuk minuman. Kaidah hukum Islam yang berlaku untuk produk minuman meliputi 4 Faktor yaitu memabukkan, membahayakan, najis, dan terkontaminasi dengan bahan yang haram atau najis. Tiga faktor yang terakhir sama kaidahnya dengan produk

makanan, sedangkan faktor memabukkan merupakan faktor yang khas pada produk minuman.

Beberapa jenis minuman yang memabukkan (*alcoholic beverages*) secara garis besar dikelompokkan menjadi wine, bir, dan sprite yang terdiri dari liquor dan liqueurs (*cordials*). Ada beberapa jenis bir yang beredar dipasaran dengan kadar alkohol bervariasi dan dapat mencapai 5,5 % bahkan pada strong beer dapat mencapai 8 %. Ada juga salah satu bir yang disebut lager yaitu bir yang disimpan sekitar 6 bulan sebelum dipasarkan. Yang juga penting diketahui ialah ada produk minuman yang dibuat dari campuran bir (dapat pula bahan dasar bir), perisa (*flavourings*), air dan bahan lainnya yang ditambah lagi dengan gas karbondioksida yang dipasaran dikenal sebagai minuman shandy.

Pada dasarnya keberadaan jaminan produk pangan halal berangkat dari informasi yang benar, jelas, dan lengkap baik secara kuantitatif maupun kualitas dari produk pangan yang mereka konsumsi. Pencantuman label halal sebagai konsekuensi sebuah produk yang bersertifikat halal akan mengembalikan hak-hak konsumen untuk menyeleksi dan mengkonsumsi jenis makanan yang mereka hendak konsumsi. Oleh karena itu pencantuman label harus terbuka dan jelas terlihat, sehingga menunjukkan adanya itikad baik dari pelaku usaha untuk mengembalikan hak-hak konsumen. Karena selain untuk menjamin aspek kesehatan, juga bahkan yang sangat penting adalah sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan dan kepuasan batin bagi masyarakat.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

###### ***1. Jenis Penelitian***

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat.<sup>49</sup>

###### ***2. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian akan difokuskan pada peranan LPPOM MUI Sulawesi Selatan yang berada Di Kota Makassar. Hal ini dikarenakan, LPPOM MUI Sul-sel merupakan pusat sentral dalam pengkajian makanan yang dapat diberikan sertifikasi halal MUI. Tempat tersebut akan menjadi titik fokus penelitian, guna memperoleh data yang akurat.

##### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan Undang-undang, pendekatan Undang-undang yaitu suatu bentuk pendekatan dengan menggunakan disiplin ilmu dan peraturan-peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan pendekatan komparatif, pendekatan komparatif ialah suatu cara untuk dapat

---

<sup>49</sup> Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Pres, 1984), h.10

memahami dan mengetahui sesuatu ilmu dengan menggunakan suatu perbandingan.

### ***C. Sumber Data***

Dengan demikian untuk memperoleh data yang ingin didapatkan oleh penulis, maka dibutuhkan sumber data yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer, adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individu atau kelompok, dan hasil wawancara/observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan dan hasil suatu pengujian tertentu. Metode yang dipergunakan untuk pengumpulan data primer yaitu dengan observasi
2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi penulisan yaitu Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, serta berbagai literatur-literatur buku dan jurnal yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

### ***D. Teknik Pengumpulan Data***

Dalam penelitian Empiris ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:



### **1. Observasi**

merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan bersama objek yang diselidiki. dengan mendapatkan informasi-informasi dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI Sul-sel) di Kota Makassar yang di butuhkan untuk melanjutkan Penelitian.

### **2. Wawancara**

Wawancara (Interview), yaitu salah satu bentuk komunikasi untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber yang terpercaya dan wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah wawancara kepada narasumber hingga keterangan dianggap cukup untuk melengkapi informasi terhadap penelitian.

### **3. Dokumentasi**

Peneliti secara langsung datang ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmtika Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar (LPPOM MUI Sul-sel) guna mendapatkan data penelitian untuk menunjang analisis data penelitian sehingga metode penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen Penelitian yaitu merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi guna membantu menjawab permasalahan penelitian. Instrumen sebagai alat pada waktu penelitian yang menggunakan Suatu metode.

- a. Peneliti
- b. Pedoman Wawancara
- c. Alat Perekam/Handphone
- d. Alat Tulis
- e. Informan
- f. Daftar Pertanyaaan

### ***F. Teknik Pengelolaan Analisis Data***

Dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu analisis data primer maupun data sekunder yang diperoleh penyusun guna mendapatkan gambaran nyata tentang Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Produk Makanan dan Minuman yang Beredar di Sulawesi Selatan. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum***

##### **1. Lokasi Penelitian**

###### **a. Kota Makassar**

Daerah kota makassar merupakan ibu kota dari provinsi sulawesi selatan dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa dan merupakan kota yang jumlah penduduk terbesar ketujuh di Indonesia. Maka dari itu kota makassar dikatakan sebagai kota metropolitan terbesar di Indonesia timur, kota ini memiliki keunikan tersendiri dari banyaknya destinasi yang sering dikunjungi pengunjung. Diluar dari itu makassar juga dikenal dengan kota kuliner yang memiliki berbagai macam jenis-jenis makanan dan minuman khasnya yang dapan memanjakan lidah dari wisatawan dari luar daerah, sperti coto makassar, pallu basa, pisang epe dan sarabba. Selain dari itu dalam kegiatan ekonomi makassar juga termasuk kota yang yg pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata terbukti dengan banyaknya lapangan pekerjaan terutama dibidang produksi antara lain makanan dan minuman. Disamping itu makassar juga merupakan kota yang identik dengan tingkat kejahatan tertinggi nomor 8 di Indonesia, terutama dalam kejatan tindak pidana penipuan sperti halnya makanan dan minuman yang diedarkan tanpa melalui sertifikasi halal dari Majelis ulama indonesia (MUI) kota makassar.

###### **b. LPPOM MUI SUL-SEL**

Pembentukan LPPOM MUI didasarkan atas mandat dari Pemerintah/negara agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI.

Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal. Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas muslimin makassar.

Sedangkan kerjasama dengan lembaga telah terjalin dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Timur Tengah, GS1 Indonesia, dan Research in Motion (Blackberry). Khusus dengan Badan POM,

sertifikat halal MUI merupakan persyaratan dalam pencantuman label halal pada kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia. Kini, dalam usianya yang ke-28 tahun, LPPOM MUI semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga sertifikasi halal yang kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sistem sertifikasi dan sistem jaminan halal yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri, yang kini mencapai 42 lembaga dari 23 negara.<sup>50</sup> Adapun bentuk logonya LPPOM MUI yang memiliki label halal,



## Visi

Menjadi lembaga sertifikasi halal terpercaya di Indonesia dan dunia untuk memberikan ketentraman bagi umat Islam serta menjadi pusat Halal dunia yang memberikan informasi, solusi dan standar yang diakui secara nasional dan internasional.

---

<sup>50</sup>LPPOM MUI Provinsi Sulawesi Selatan, *Sejarah LPPOM MUI Sulawesi Selatan*. Dikutip dalam situs [http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go\\_to\\_section/130/1511/page/1](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/130/1511/page/1). (Diakses pada Tanggal 14 Januari 2021).

## Misi

1. Menetapkan dan mengembangkan standar Halal dan standar audit halal.
2. Melakukan sertifikasi produk pangan, obat dan kosmetika yang beredar dan dikonsumsi masyarakat.
3. Melakukan edukasi halal dan menumbuhkan kesadaran untuk senantiasa mengkonsumsi produk halal.
4. Menyediakan informasi tentang kehalalan produk dari berbagai aspek secara menyeluruh.<sup>51</sup>

### ***B. Ketentuan Hukum Bagi Peroduk Makanan Dan Minuman Tidak Berlabel Halal***

Adapun ketentuan hukumnya menurut syariat islam adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan berdasarkan ketentuan al-qur'an dan hadits. Produk yang memenuhi makanan dan minuman yang halal diantaranya:

1. Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi. Seperti: lard (lemak babi), gelatin babi, emulsifier babi (E471), lechitine babi, kuas dengan bulu babi (bristle). Hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2):173.

---

<sup>51</sup>LPPOM MUI Provinsi Sulawesi Selatan, *Sejarah LPPOM MUI Sulawesi Selatan*. Dikutip dalam situs [http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go\\_to\\_section/130/1511/page/1](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/130/1511/page/1). (Diakses pada Tanggal 14 Januari 2021).

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ  
 اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
 رَّحِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

2. Kedua daging yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara

Syariat Islam. QS. al-Maaidah (5):3.

وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ  
 وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ  
 الْيَوْمَ يَيسرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ أَ  
 لْيَوْمٍ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ  
 الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ  
 اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena

lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

3. Semua bentuk makanan/minuman yang tidak mengandung alkohol dan turunannya, atau bukan alkohol sebagai suatu ingredient yang sengaja ditambahkan, serta bukan khamr. QS.al-Maaidah (5):90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ  
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Daripada Abu Hurairah r.a beliau berkata: Rasulullah SAW telah bersabda:” Sesungguhnya Allah Ta’ala baik, Dia tidak menerima kecuali perkara yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang telah diperintahkan kepada para Rasul di mana Allah Ta’ala berfirman: (Wahai para Rasul! Makan minumlah kamu makanan yang baik-baik dan hendaklah kamu beramal soleh). Dan Allah Ta’ala berfirman: (Wahai orang-orang yang beriman! Makan minumlah kamu makanan yang baik-baik yang Kami rezekikan kepada kamu). Kemudian Baginda menyebut perihal seorang lelaki yang bermusafir jauh, yang berambut kusut masai dan berdebu, yang menadah tangan ke langit (iaitu berdoa): Wahai Tuhanku! Wahai Tuhanku! Bagaimanakah doanya akan dimakbulkan sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram?” (Hadis riwayat al-Imam Muslim).



Inti dari penjelasan ayat dan hadis yang diatas tersebut ALLAH SWT dengan secara tegas melarang hambanya memakan makanan dan meminum minuman yang tidak memenuhi standar halal yang di jelaskan pada ayat tersebut.

Ketentuan hukumnya menurut undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 8 ayat(8) yaitu “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”

Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Pasal 4 UU 33/2014, produk yang diwajibkan bersertifikat halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pasal 18 ayat (1) UU/2014, “bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana yang dimaksud paada pasal 17 ayat (3) meliputi:

1. bangkai;
2. darah;
3. babi; dan atau

4. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

Pasal 26 UU/2014, “1. Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 dan 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal. 2. Pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal”.

Jadi inti dari penjelasan pada undang -undang yang diatas yaitu:

1. Produk/jasa yang di produksi dan di perdagangan di indonesia wajib mengikuti produksi secara halal.
2. Pelaku usaha/produsen wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang komposisinya mengandung sebagaimana yang dimaksud pada pasal 18 UU No 8 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Adapun ketentuan hukum bagi produk makanan dan minuman tidak berlabel halal menurut LPPOM MUI Sulawesi Selatan berdasar hasil dari hasil keterangan wawancara dengan salah satu pegawainya yaitu bapak Achmad Juwaeni (selaku Kepala bidang humas dan produk halal di LPPOM MUI Sulawesi selatan) dalam keterangannya sebagai berikut:

“kita bisa lihat didalam Undang-Undang No jaminan produk halal pada pasal 4 produk yang masuk beredar, diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi penekanan pada pasal tersebut yaitu setiap produk yang beredar diwilayah Indonesia wajib berlabel halal, jadi ketentuan hukumnya sda

jelas bahwa produk yang beredar di negara kita tidak berlabel halal itu tidak boleh diedarkan apabila diedarkan berarti otomatis melanggar hukum.”<sup>52</sup>

### ***C. Bentuk perlindungan Hukum Bagi Peroduk Makanan Dan Minuman Tidak Berlabel Halal***

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen. Sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 UUPK bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adanya suatu perlindungan hukum yang mampu melindungi hak-hak konsumen dari kesewenang-wenangan dari produsen/pelaku usaha. Pemerintah mempunyai peran dalam melindungi konsumen terhadap produk makanan berlabel halal terutama konsumen muslim. Karena melindungi konsumen muslim merupakan amanat yang disyariatkan Islam. Adapun dalam Al-Qur'an disebutkan:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَهُمْ فِيهَا زَوْجٌ مٌطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا ظِلِيلٌ

Artinya:

“Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang shaleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya

---

<sup>52</sup> Achmad Juwaeni , (Kepala Bidang Humas Dan Produk Halal LPPOM MUI Sulawesi Selatan), wawancara, Kamis 14 Januari 2021.

mempunyai isteri- isteri yang Suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman (Q.S.An-nisa:57) <sup>53</sup>

Ayat di atas ditujukan kepada para pemimpin, agar mereka melaksanakan hak-hak konsumen muslim. Penjagaan dan penentuan halalnya produk makanan yang akan dikonsumsi oleh konsumen muslim adalah bagian hak-hak dari konsumen muslim yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan kesewenang-wenangan produsen/pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian.

Didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, pengertian perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Undang-undang perlindungan konsumen telah mengatur bahwa pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal sebagaimana pernyataan “Halal” yang dicantumkan dalam label halal diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah.

Bukti keseriusan dari pemerintah Indonesia dalam menjamin hak-hak konsumen serta memberikan rasa aman bagi masyarakatnya terhusus yg beragama

---

<sup>53</sup> Al-quran, dan tafsir dikutip dalam situs <https://tafsirweb.com/1589-quran-surat-an-nisa-ayat-57.html>. (diakses pada tanggal 10 maret 2021).

islam yaitu dengan cara membuat undang nomor 33 tentang jaminan produk halal, kemudian disahkan pada tahun 2014.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh LPPOM MUI berdasarkan dari hasil keterangan wawancara dengan bapak achmad juwaeni (selaku kepala bidang humas dan peroduk halal LPPOM MUI Sulawesi Selatan) yaitu

“peranan LPPOM MUI dalam memberikan perlindungan ke konsumen, yaitu selalu aktif menghimbau mensosialisasikan terutama kepada masyarakat muslim agar untuk selektif dalam hal mengkonsumsi makanan serta minuman agar selalu memperhatikan yang bersertifikasi halal. Dan membrikann nomor registrasi bagi produk yang telah melalui proses sertifikasi halal, serta berusaha memberikan peringatang yang keras dalam bentuk sangsi kepada perusahaan untuk melakukan proses produksi sesuai aturan yang berlaku sehingga hasil produksi konsiten pada kehalalannya.tetapi harapannya tetap kepada produsennya.”<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Achmad Juwaeni, (Kepala Bidang Humas Dan Produk Halal LPPOM MUI Sulawesi Selatan), wawancara, Kamis 14 Januari 2021.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan penelitian di atas penulis menarik kesimpulan :

1. Ketentuan Hukum bagi peredaran makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal adalah boleh di edarkan asalkan di dalam komposisi produk wajib mencantumkan keterangan produksi dan memberikan keterangan pada produk tersebut bahwasanya produk tersebut tidak halal .
2. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas produk makanan dan minuman yang tidak memiliki Label Halal, yatu dengan cara membuat Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, serta melakukan sosialisasi tentang produk halal, dan menerbitkan sertifikat halal bagi produk yang telah melalui berbagai tes yang di lakukan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika majelis ulama indonesia serta memberikan sangsi/denda kepada pelaku usaha yang tiadak mengikuti prosedur halal.

## **B. Saran**

1. Pihak pemerintah sebaiknya menaruh perhatian khusus pada peredaran produk makana dan minuman yang tidak memiliki label halal, serta lebih mepertegas kembali bahwa setiap produk yang di edarkan di Indonesia harus memiliki label hala, dan kalau bisa seharusnya pemerintah terkhusus kepada lembaga pengkajian pangan obat-obatan dan kosmetika majelis ulama Indonesia (LPPOM MUI) baiknya, memberikan label haram juga bagi produk yang yang tidak sesuai sayriat islam.
2. pemerintah dalam hal ini harus lebih mengedepankan hak-hak konsumen, agar supaya msyarakat (konsumen) muslim terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan baginya. Serta lebih memperketat pengawasan terkhusus bagi perusahaan (produsen) yang nakal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Guguk, Erman Raja. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mandar Maju, 2003.
- Hadad, Tini dan A.Z. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Diadit Media, 2001.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet.VII; Jakarta: Sinar Grafika 2018.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.X; Jakarta: Rajawali Pers 2017.
- , *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Cet.III; Depok:Rajawali Pers 2017.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Nurmadjito. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet.I; Depok: Kencana, 2018.
- Sofie, Yusuf. *kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta:Ghalia Indonesia,2007.
- Soekanto, Soejono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Pres,1984.
- , *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Tarwotjo, Soejoeti. *Dasar-Dasar Gizi Kuliner*. Jakarta :Grasindo,2008.
- Winarti, Sri. *Minuman Kesehatan*. Surabaya: Trubus Agrisarana, 2006.
- Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Cet.I; Jakarta timur: Kencana, 2018.



## **Jurnal:**

- Ashabul Kahpi. “Pemahaman konsep Halal dan Halal Awareness dalam perilaku konsumen muslim BreadTalk di Surabaya” *Jurnal, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syaria Dan Hukum*. 2019
- Ashabul Kahpi..”*Perlindungan Terhadap Konsumen dari Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia/Zat Berbahaya Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999*. 2012. Jurnal Hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Ashabul, Kahpi.” *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia*.” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2018.
- Asri, “*Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal*”, *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*, Volume IV Nomor 2,2016.
- Ahmad Halka, “*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk Makanan dan Minuman di Kota Makassar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, Skripsi (Makassar :Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Makassar,2017).
- Erlina, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kontak Terapeutik*.” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 2016.
- Istiqamah.”*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Listrik pada PT. PLN (persero) Cabang Makassar*” (*Jurnal, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*). 2018.
- St, Nurjannah. “*Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen*.” *Al Daulah*.”: *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2.1 ,2013.
- St, Nurjannah. “*Analisis Penggunaan Zat Pemanis dan Zat Pewarna Sintetis Berbagai Merek Produk Saus Lombok Lokal di Pasar Tradisional Terong Makassar Tahun 2012*”. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012..
- Yuli Mutiah Rambe, Syaad Afifuddin, “*Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Al-Washliyah, Medan)*”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, (Desember 2012), Diakses 7 Oktober 2020).

Tengku Putri Lindung Bulan, “*Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Sosis di Kuala Simping Kabupaten Aceh Tamiang*”, Jurnal Manajemen Dan Keuangan, Vol.5, No.1, (Mei 2016), (Diakses Tanggal 7 Oktober 2020).a

Sucipto, “*Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin*”, (Diakses Tanggal 7 Oktober 2020).

Shilachul Alfinul Alim, M Kholid Mawardi, Aniesa Samira Bafadhal, “*Pengaruh Persepsi Label Halal Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fesyen Muslim ( Survei pada Pelanggan Produk Zoya Muslim di Kota Malang )*”, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 62 No. 1 (September 2018), (Diakses 7 Oktober 2020).

Vivi Yunitasari, Moch. Khoirul Anwar, “*Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan Impor Pada Mahasiswa Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*” Jurnal Ekonomi Islam Volume 2 Nomor 1, (Tahun 2019), (Diakses 7 Oktober 2020)

Ian Alfian, Muslim Marpaung, “*Analisis Pengaruh Label Halal, Brand Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Di Kota Medan*”, At-Tawassuth, Vol. 2, No. 1, (Tahun2017), (Diakses 7 Oktober 2020).

Musyfikah Ilyas, “*Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat*”, Al - Qadau Volume 4 Nomor (2 Desember 2017), (Diakses Tanggal 7 Oktober 2020).

Huzaemah TahidoYanggo, “*Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukumislam*”, Vol.IXNo.2,(Desember2013), (Diakses Tanggal 7 Oktober 2020).

Dharu Triasih dkk,” *Kajian tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal*” Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18 Nomor 2, 2016.

#### **Perundang-Undangan:**

UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal

UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

UU No 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

**Website:**

<https://kbbi-web-id.cdn.amproject.org/v/s/kbbi.web.id/> perlindungan. Di akses pada tanggal 30 september 2020,pukul 14:40.

<http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II>. perlindungan Di akses pada tanggal 30 september 2020 pukul 16:12.

<https://jagokata.com/arti-kata/konsumen.html>. di akses pada tanggal 30 september 2020 pukul 15:51

<https://tafsirweb.com/1972-quran-surat-al-maidah-ayat-88.html>. Diakses Pada Tanggal 7 Oktober 2020, Pukul 03.35

[http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go\\_to\\_section/130/1511/page/1](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/130/1511/page/1). Diakses pada tanggal 14 Januari, Pukul 01:34


<https://tafsirweb.com/1589-quran-surat-an-nisa-ayat-57.html>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021, pukul 14:27

## LAMPIRAN

Wawancara dengan pegawai LPPOM MUI Sul-Sel



## Data Hasil Penelitian




**LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROPINSI SULAWESI SELATAN**  
 Sekretariat : Jl. Sultan Alaaddin No. 63 Gunung Sari  
 Hp/WA : 08114706125, Email : [lpommuisulsel06@yahoo.com](mailto:lpommuisulsel06@yahoo.com)  
 Website : [www.halalmuisulsel.org](http://www.halalmuisulsel.org)  
 Makassar 90221

---


**DATA PERUSAHAAN YANG DISERTIFIKASI PER TAHUN**

Tahun	Kategori		
	Catering	Industri Pengolahan	RPA & RPH
2017	18	176	7
2018	14	134	10
2019	27	271	12
2020	24	149	-

Direktur LPPOM MUI  
Provinsi Sulawesi Selatan,



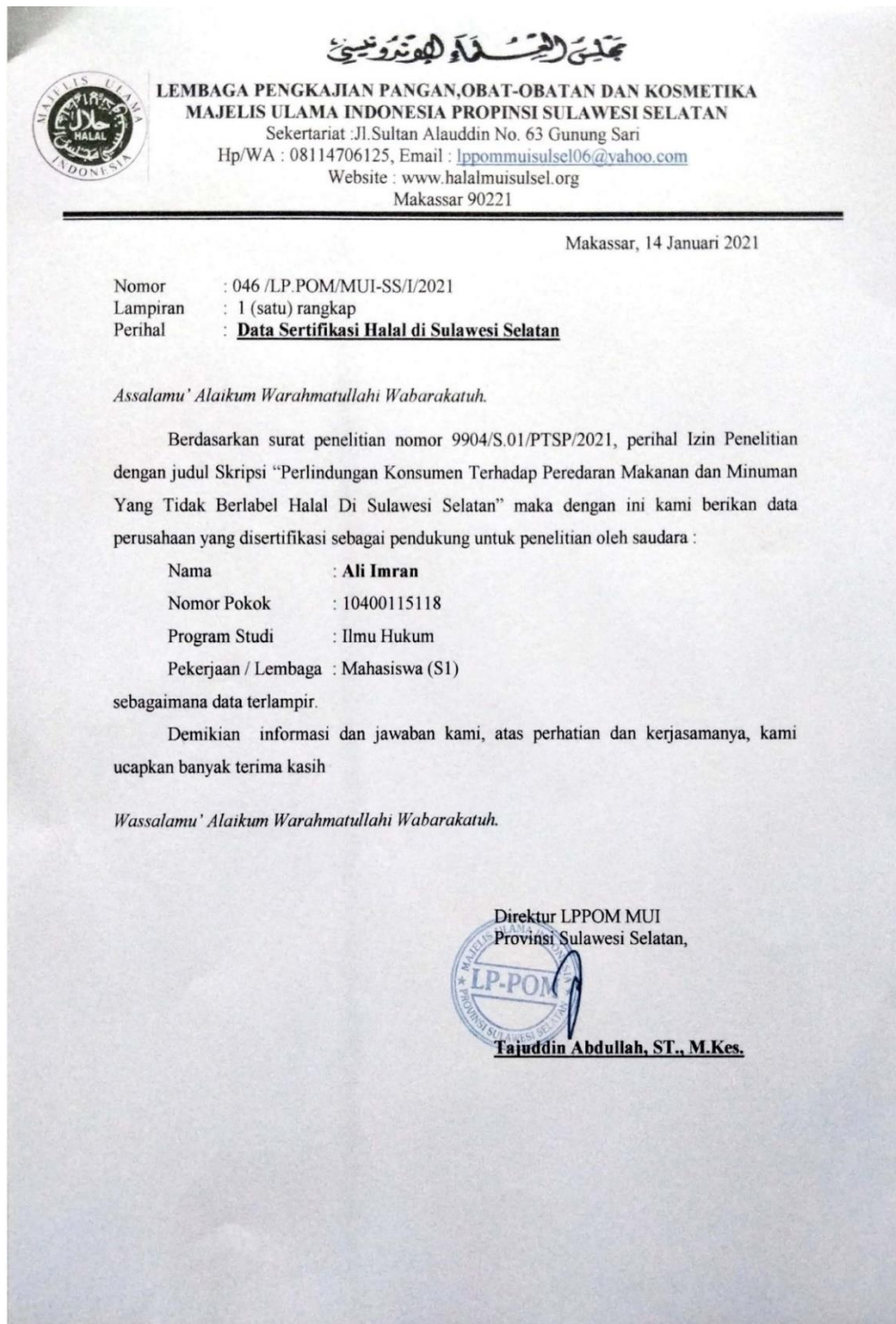
**Tajuddin Abdullah, ST., M.Kes.**



Dipindai dengan CamScanner



Bukti Telah Meneliti



Dipindai dengan CamScanner

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ali Imran, lahir di Lona pada tanggal 24 Desember 1998, anak dari pasangan bapak Ir. Muh. Alwi,.M.Mp dan ibu Migawati S.Pd. Penulis mengawali jenjang pendidikannya di SDN 01 Kabupaten Bombana dan lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan di Pondok Pesantren As'adiyah pada tingkat Madsah Tsanawiyah (MTs) Putra 2 As'adiyah Sengkang, lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas atau Madrasah Aliyah (MA) di MA Putra 2 As'adiyah Sengkang, lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Selama menempuh pendidikan diperguruan tinggi penulis bergabung pada organisasi Forum Komunikasi Mahasiswa Dan Alumni As'adiyah sebagai ketua umum periode tahun 2019/2020. Kemudian bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Makassar tercatat sebagai koordinator humas dan dana periode tahun 2017/2018. Dan organisasi Lintas Mahasiswa Hukum anggota departemen bakat dan minat periode tahun 2017/2018.